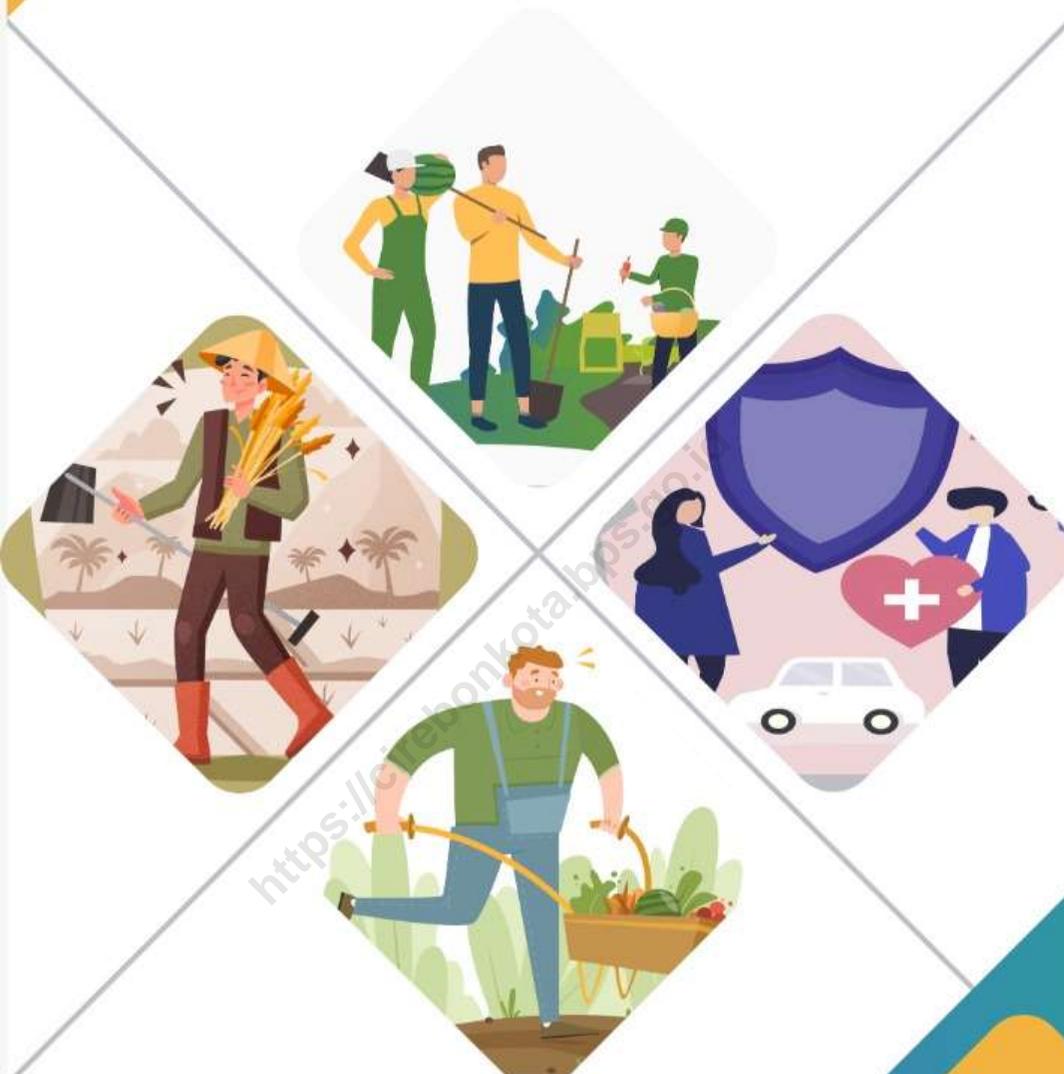


Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Cirebon 2022



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA CIREBON**

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Cirebon 2022

ISSN : -
Nomor Publikasi : 32740. 2213
Katalog BPS : 4102004.3274

Ukuran Buku : 18,2x25,7 cm
Jumlah Halaman : 64 halaman

Naskah : Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis

Gambar Kulit : Muhammad Maftuhin

Diterbitkan Oleh : Badan Pusat Statistik Kota Cirebon

Boleh mengutip dengan menyebutkan sumbernya.

<https://cirebonkota.bps.go.id>

Kata Pengantar

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Cirebon 2022 menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat Kota Cirebon antar waktu. Data yang digunakan bersumber dari BPS hasil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2022, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2022, dan data yang diperoleh dari publikasi lainnya.

Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan yang datanya tersedia dan terukur. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut delapan bidang yang mencakup Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, Kemiskinan, serta Sosial Lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.

Kami memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini. Akhirnya, kami mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan publikasi serupa di masa mendatang.

Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Cirebon



Joni Kasmuri, SST SE ME
NIP. 196801181989021001

<https://cirebonkota.bps.go.id>

Daftar Isi

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	3
Daftar Isi	5
Daftar Tabel	7
Daftar Grafik	8
BAB I	
Kependudukan	
I.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk	11
I.2 Kepadatan Penduduk	13
I.3 Rasio Jenis Kelamin dan Angka Beban Ketergantungan	13
I.4 Status Perkawinan	16
I.5 Penggunaan Alat/Cara KB	18
BAB II	
Kesehatan	
2.1 Status Kesehatan	21
2.2 Penolong Persalinan	26
BAB III	
Pendidikan	
3.1 Kemampuan Membaca dan Menulis	29
3.2 Partisipasi Sekolah	31
BAB IV	
Ketenagakerjaan	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	37
BAB V	
Pola Konsumsi	
Pengeluaran Rumah Tangga	42
BAB VI	
Perumahan dan Lingkungan	
6.1 Kualitas Rumah Tinggal	46
6.2 Fasilitas Rumah Tinggal	47
6.3 Status Kepemilikan Rumah Tinggal	49
BAB VII	
Kemiskinan	
7.1 Perkembangan Penduduk Miskin	54
7.2 Garis Kemiskinan (GK), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	55

BAB VIII	Sosial Lainnya	
	8.1 Teknologi Infomasi	60
	8.2 Perlindungan Sosial	61

<https://cirebonkota.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

		<i>Halaman</i>
Tabel 1	APS dan APM Penduduk Kota Cirebon, 2020-2022	32
Tabel 2	Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Penduduk Kota Cirebon, 2020-2022	33
Tabel 3	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Makanan dan Non Makanan, 2021-2022	43

<https://cirebonkota.bps.go.id>

DAFTAR GRAFIK

		<i>Halaman</i>
Grafik 1	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Cirebon Tahun 2020-2022	12
Grafik 2	Kepadatan Penduduk Kota Cirebon Tahun 2020-2022	13
Grafik 3	Struktur Umur Penduduk Kota Cirebon, 2022 (000 jiwa)	15
Grafik 4	Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas Berdasarkan Status Perkawinan, 2021-2022	17
Grafik 5	Persentase Penduduk 15-49 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan, 2021-2022	18
Grafik 6	Persentase Perempuan Berstatus Kawin dan Berumur 15-49 Tahun Menurut Status Penggunaan Alat/ Cara KB Tahun 2021-2022	19
Grafik 7	Umur Harapan Hidup Kota Cirebon, 2018-2022	22
Grafik 8	Angka Kesakitan, 2018-2022	23
Grafik 9	Persentase Penduduk Yang Menggunakan Jaminan Kesehatan, 2018-2022	25
Grafik 10	Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun Yang Pernah Melahirkan Dalam 2 Tahun Terakhir, 2021-2021	26
Grafik 11	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Kemampuan Membaca dan Menulis, 2021-2022	31
Grafik 12	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas dan Angkatan	38

Kerja, 2020-2022

Grafik 13	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin, 2020-2022	39
Grafik 14	Status Pekerjaan Utama, 2020-2022	40
Grafik 15	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin, 2020-2022	40
Grafik 16	Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan, 2021	46
Grafik 17	Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan, 2021-2022	48
Grafik 18	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah, 2021-2022	50
Grafik 19	Jumlah Penduduk Miskin, 2020-2022 (Maret, ribuan jiwa)	54
Grafik 20	Garis Kemiskinan, 2020-2022 (Rupiah/Kapita/Bulan)	56
Grafik 21	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), 2020-2022	57
Grafik 22	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), 2020-2022	58
Grafik 23	Persentase Anggota RT Berusia 5 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin Dan Penggunaan Teknologi Informasi, 2022	61
Grafik 24	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Perlindungan Sosial, 2022	63

<https://cirebonkota.bps.go.id>

Bab I Kependudukan

Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk (Undang-Undang No. 24 Tahun 2013).

Dari waktu ke waktu jumlah penduduk terus mengalami peningkatan. Teori Malthus menjelaskan bahwa penambahan jumlah penduduk mengikuti deret geometri. Jumlah penduduk yang tinggi akan menjadi kendala pembangunan apabila tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan penduduknya. Oleh karena itu, data kependudukan diperlukan dalam perencanaan pembangunan antara lain penyediaan fasilitas pelayanan publik, penyediaan tenaga terampil maupun ahli, pembangunan infrastruktur, dan penentuan program yang tepat sasaran.

Tahun 2030 Indonesia diprediksi akan mengalami bonus demografi, yaitu ketika jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibanding penduduk usia tidak produktif (berusia dibawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Bonus demografi menjadi sebuah kesempatan emas ketika dapat memanfaatkannya dengan optimal. Keberhasilan pembangunan sumber daya manusia akan menjadi modal Indonesia menjadi negara maju.

1.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

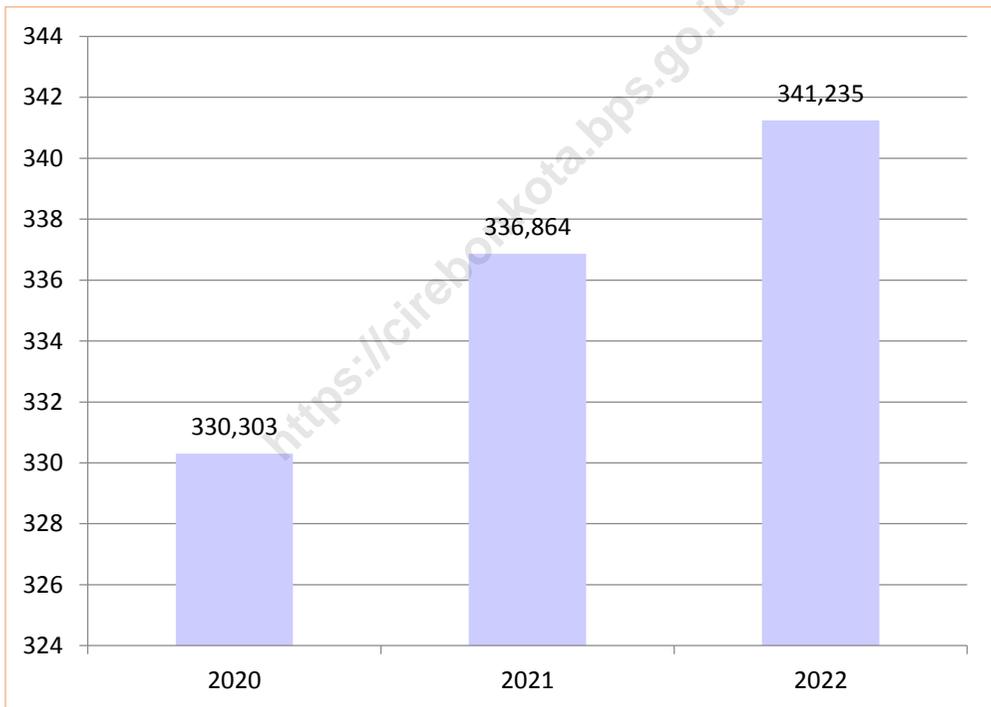
Berdasarkan proyeksi dari Sensus Penduduk 2020, penduduk Kota Cirebon pada tahun 2022 sebesar 341.235 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki sebesar 171.202 jiwa, sementara jumlah penduduk perempuan sebesar 170.033 jiwa. Maka, rasio jenis kelamin penduduk Kota Cirebon

adalah 100,68 yang artinya terdapat 101 laki-laki untuk setiap 100 perempuan di Kota Cirebon.

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat berjumlah 49,41 juta jiwa, terdiri dari 24,34 juta perempuan dan 25,07 juta laki-laki. Apabila dibandingkan, jumlah penduduk Kota Cirebon sekitar 0,69 persen dari jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat.

Grafik 1

Jumlah Penduduk Kota Cirebon (ribu jiwa), 2020-2022

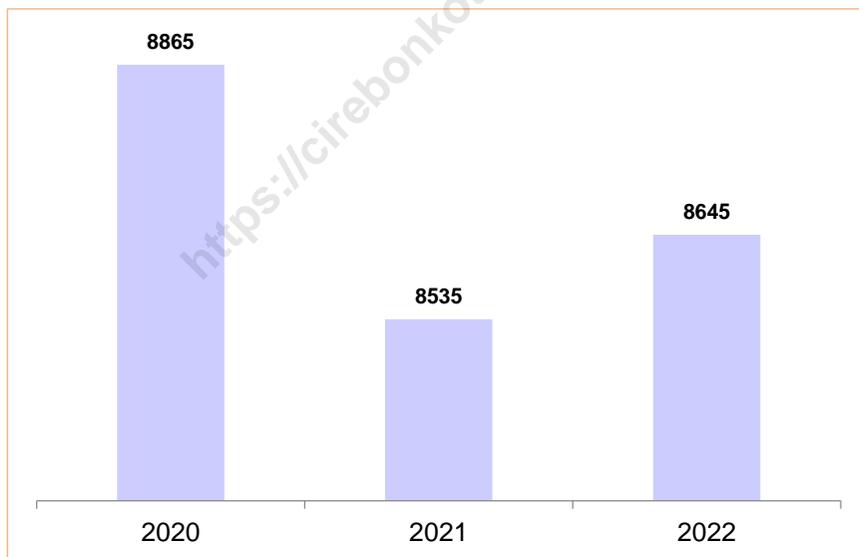


Sumber: Proyeksi Interim Sensus Penduduk 2020

1.2 Kepadatan Penduduk

Pada tahun 2021, terjadi penambahan luas wilayah Kota Cirebon dari yang semula 37,26 km² menjadi 39,47 km². Penambahan luas wilayah tersebut berdampak pada penurunan angka kepadatan penduduk dari 8.865 pada tahun 2020, menjadi 8535 (tahun 2021) dan 8.645 (tahun 2022). Kepadatan penduduk 8.645 mempunyai makna bahwa pada setiap 1 km² terdapat 8.645 jiwa penduduk. Kepadatan jumlah penduduk Kota Cirebon mengalami peningkatan seiring dengan pertambahan jumlah penduduknya.

Grafik 2.
Kepadatan Penduduk Kota Cirebon, 2020-2022



1.3 Rasio Jenis Kelamin dan Angka Beban Ketergantungan

Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) merupakan angka perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah. Sedangkan angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) menunjukkan berapa tingginya beban yang harus ditanggung

penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Rasio jenis kelamin penduduk Kota Cirebon pada tahun 2022 sebesar 100,62. Artinya, pada setiap 100 penduduk perempuan yang tinggal di Kota Cirebon terdapat 101 penduduk laki-laki, atau dengan kata lain jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan.

Gambar 1.

Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Cirebon 2020-2022

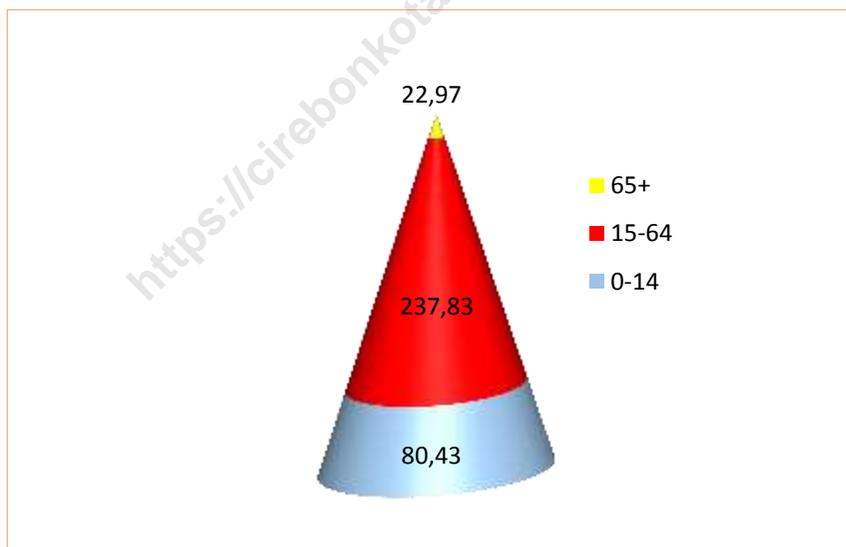


Sumber: Proyeksi Interim 2020-2023

Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio*) merupakan perbandingan penduduk usia yang belum dan tidak produktif lagi dengan jumlah penduduk usia produktif. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Semakin rendahnya angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya.

Penduduk Kota Cirebon pada tahun 2022 didominasi penduduk usia produktif. Persentase penduduk usia muda (0-14) tahun sebesar 23,57 persen. Persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 69,70 persen. Persentase penduduk usia tua (65+) sebesar 6,73 persen. Angka beban ketergantungan sebesar 43,50. Hal ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sekitar 44 penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kota Cirebon sangat potensial sebagai modal dasar untuk pembangunan.

Grafik 3
Struktur Umur Penduduk Kota Cirebon, 2022 (ribu jiwa)



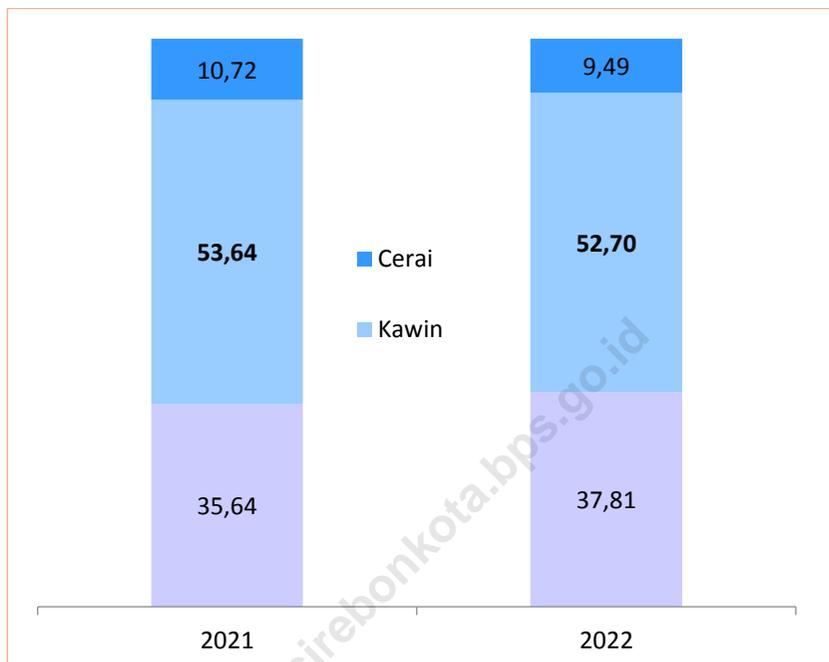
Sumber: Proyeksi Interim 2020-2023

1.4 Status Perkawinan

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pembentukan keluarga yang bahagia erat kaitannya dengan keturunan.

Berdasarkan data hasil Susenas tahun 2022, persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang berstatus belum kawin sebanyak 37,81 persen atau lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 35,64 persen. Selanjutnya, persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang berstatus kawin sebanyak 52,70 persen atau lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 53,64 persen. Sedangkan persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang berstatus cerai adalah 9,49 persen atau lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 10,72 persen.

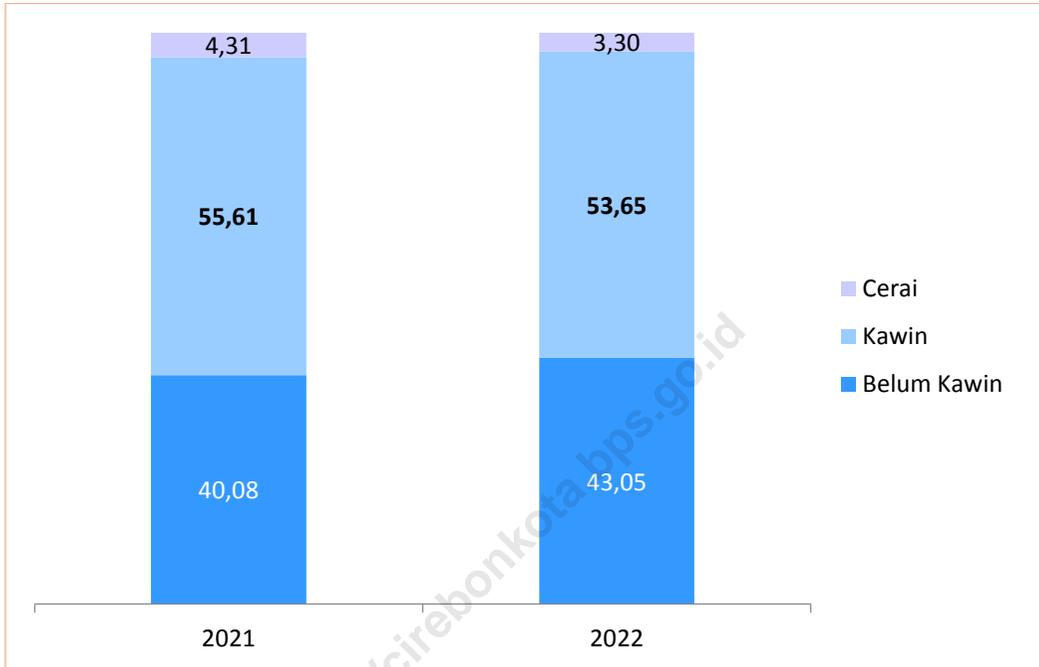
Grafik 4.
Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas
Berdasarkan Status Perkawinan, 2021-2022



Sumber : Susenas Maret 2021-2022

BPS membedakan penduduk usia produktif menjadi dua kategori, yaitu penduduk sangat produktif pada usia 15-49 tahun dan penduduk usia produktif pada usia 50-64 tahun. Berdasarkan data hasil Susenas tahun 2022, persentase penduduk di Kota Cirebon yang berusia 15-49 tahun dan berstatus belum kawin sebanyak 43,05 persen atau lebih tinggi dibandingkan persentase tahun 2021 yakni sebanyak 40,08 persen. Selanjutnya, persentase penduduk di Kota Cirebon yang berusia 15-49 tahun dan berstatus kawin sebanyak 53,65 persen, lebih rendah dibandingkan persentase pada tahun 2021 yakni sebanyak 55,61 persen. Sementara penduduk usia 15-49 tahun yang berstatus cerai sebanyak 3,30 persen, lebih rendah dibandingkan persentase tahun 2021 yakni sebanyak 4,31 persen.

Grafik 5.
Persentase Penduduk 15-49 Tahun
Menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan, 2021-2022



Sumber : Susenas Maret 2021-2022

1.5 Penggunaan Alat/ Cara KB

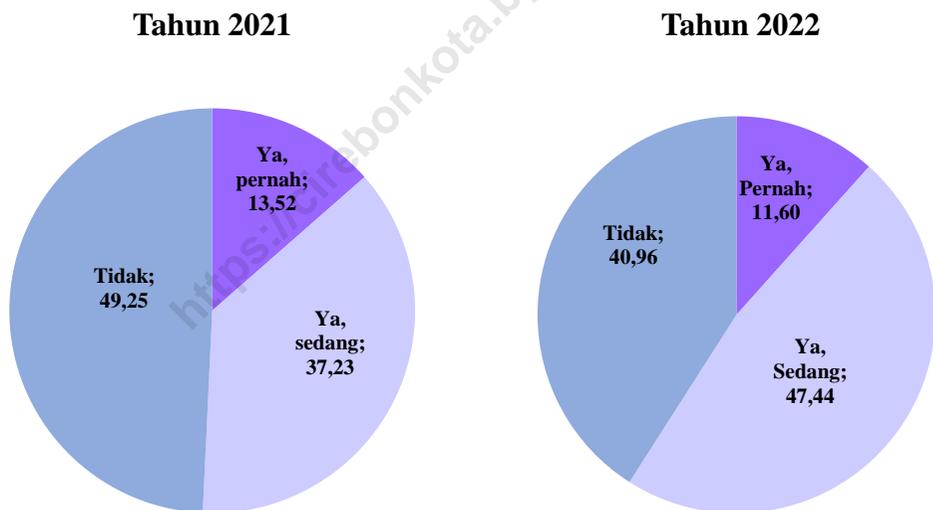
Pembangunan Indonesia dalam periode tahun 2020-2024 ditujukan untuk membentuk Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu SDM yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter. Kebijakan pembangunan manusia dimulai dari perencanaan kehidupan berkeluarga, merencanakan jumlah anak yang dikehendaki, proses kehamilan, seribu hari pertama kehidupan, pendidikan anak usia dini sampai dengan usia sekolah, remaja dengan berbagai pendekatannya dalam penyiapan generasi bangsa yang berkualitas menuju usia produktif serta perhatian terhadap kelanjutusiaan (Bapenas, 2020).

Struktur penduduk Indonesia saat ini ditandai meningkatnya penduduk usia produktif. Kondisi ini memberikan peluang mendapatkan bonus demografi dengan salah satu prasyarat yakni tersedianya SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Struktur penduduk harus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik. Salah satu faktor penentu terciptanya struktur penduduk yang diinginkan adalah pengendalian angka kelahiran.

Grafik 6.

Persentase Perempuan Berstatus Kawin dan Berumur 15-49 Tahun Menurut Status Penggunaan Alat/ Cara KB 2021-2022



Sumber : Susenas Maret 2021-2022

Program Keluarga Berencana adalah salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk serta membentuk keluarga yang berkualitas. Berdasarkan data hasil Susenas Maret 2022, persentase perempuan berstatus kawin dan berusia 15-49 tahun yang sedang menggunakan alat/cara KB mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Bab II Kesehatan

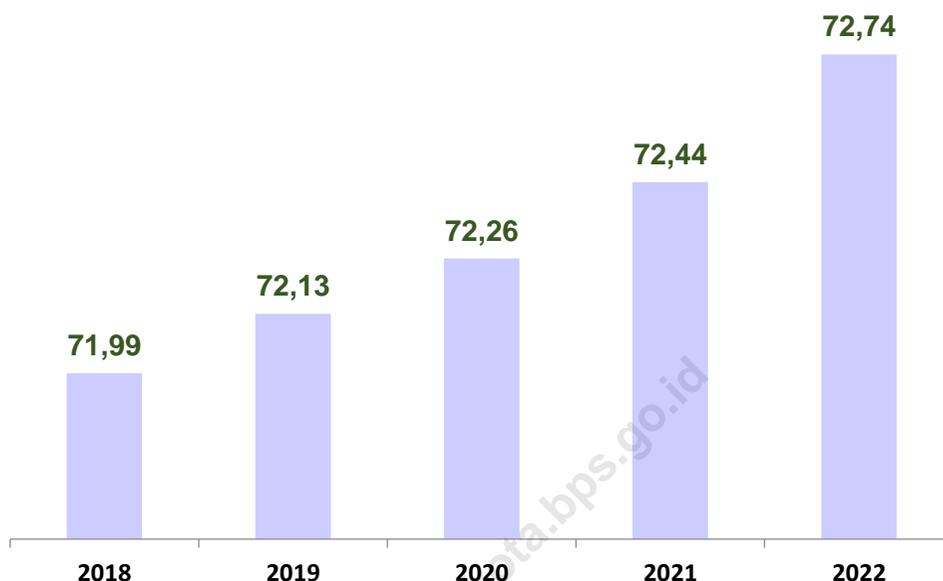
<https://cirebonkota.go.id>

Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian ibu, menurunnya angka kematian bayi, dan menurunnya angka prevalensi undernutrisi pada balita. Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tersebut diselenggarakan dengan upaya terpadu untuk seluruh masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 telah menetapkan sasaran yang ingin dicapai yaitu meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan.

2.1 Status Kesehatan

Umur harapan hidup (UHH) saat lahir merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat. Dari tahun ke tahun, Kota Cirebon telah berhasil meningkatkan umur harapan hidup penduduknya. Dalam periode tahun 2018 hingga tahun 2022, UHH terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, Umur Harapan Hidup saat lahir di Kota Cirebon adalah 72,74. Artinya, penduduk yang lahir pada tahun 2022 memiliki harapan untuk hidup hingga 72,74 tahun. Semakin tingginya umur harapan hidup mengindikasikan bahwa masyarakat Kota Cirebon memiliki harapan umur yang lebih panjang dan hidup sehat.

Grafik 7. Umur Harapan Hidup Kota Cirebon, 2018-2022

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Kota Cirebon 2022

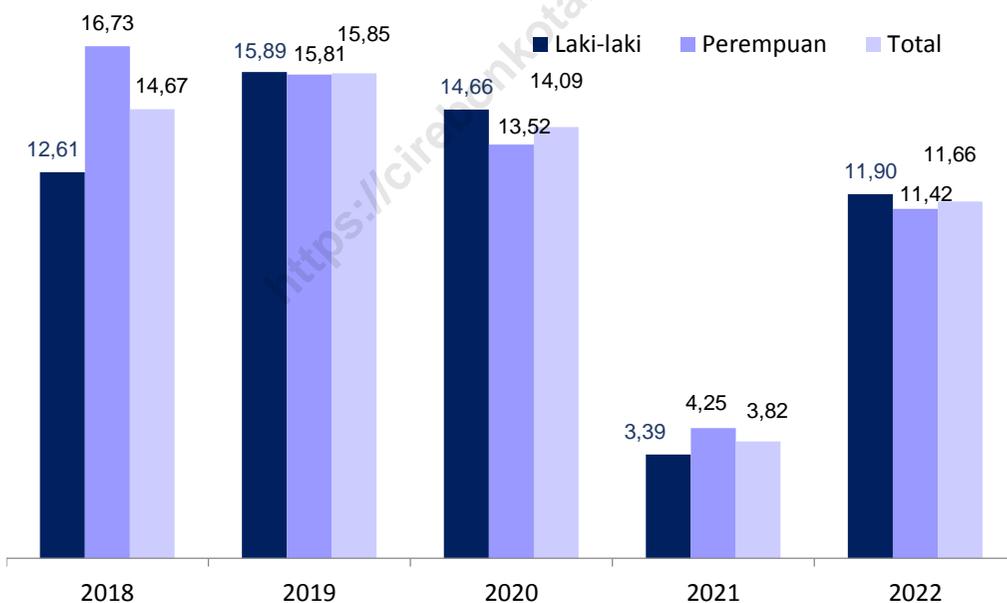
Peningkatan umur harapan hidup dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain semakin baik dan semakin mudah akses pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat. Selain itu, semakin baiknya perilaku hidup sehat masyarakat dan semakin baiknya kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Ditambah lagi daya dukung kondisi lingkungan yang semakin baik.

Angka kesakitan merupakan persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan. Keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Pada umumnya, keluhan kesehatan utama yang banyak dialami oleh penduduk adalah panas, sakit kepala, batuk, pilek, diare, asma/sesak nafas, sakit gigi. Orang yang menderita penyakit kronis dianggap

mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei (satu bulan terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya (BPS).

Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Pengetahuan mengenai derajat kesehatan suatu masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah, dan merata. Melalui upaya tersebut, diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan dari masyarakat bersangkutan.

Grafik 8. Angka Kesakitan, 2018-2022



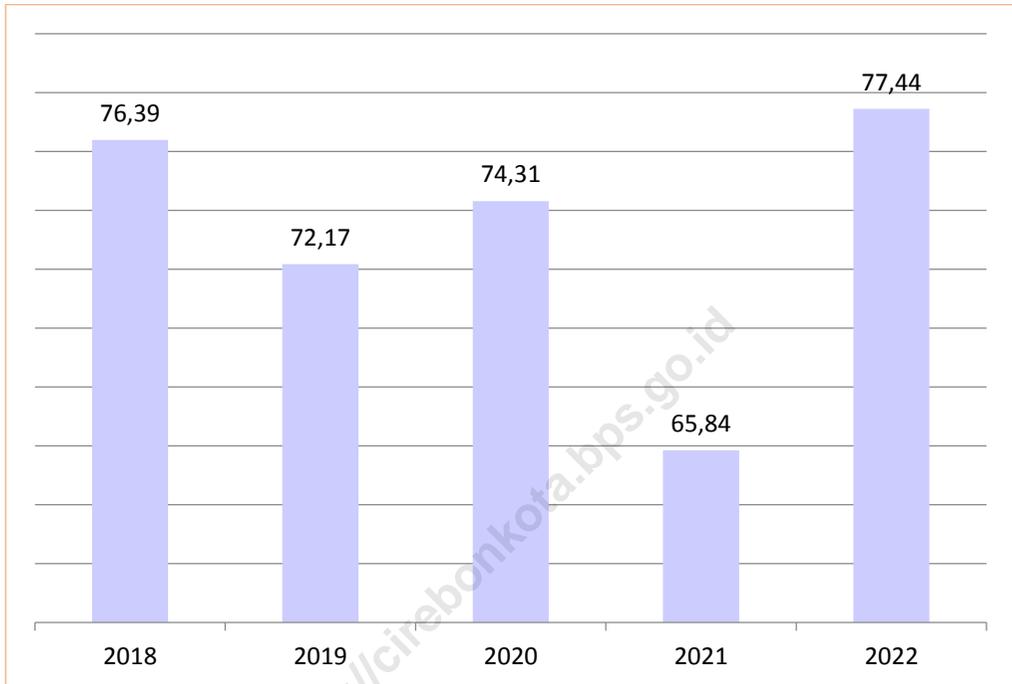
Sumber : Susenas Maret 2018-2022

Berdasarkan hasil Susenas Maret pada tahun 2021, angka kesakitan penduduk Kota Cirebon turun dibandingkan tahun 2020 menjadi 3,82. Selanjutnya, pada tahun 2022 angka kesakitan meningkat menjadi 11,66 persen. Angka tersebut memberi makna bahwa terdapat

12 persen penduduk mengalami keluhan kesehatan hingga menyebabkan terganggunya aktivitas sehari-hari.

Ketika seseorang sakit, maka sudah tentu orang yang sakit tersebut akan mengoptimalkan ikhtiarnya untuk mengembalikan kesehatannya agar aktivitas sehari-harinya tidak terganggu. Berbagai ikhtiar dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai keluhan kesehatan untuk mengembalikan kesehatannya salah satunya adalah dengan berobat jalan. Berobat jalan adalah upaya anggota rumah tangga yang mempunyai keluhan kesehatan untuk memeriksakan diri dan mendapatkan pengobatan dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas kesehatan ke anggota rumah tangga. Akibat dari berobat jalan tentunya seorang yang memiliki keluhan kesehatan harus membayar biaya berobat jalan selama proses penyembuhannya.

Grafik 9.
Persentase Penduduk Yang Menggunakan Jaminan Kesehatan, 2018-2022



Sumber : Susenas Maret 2018-2022

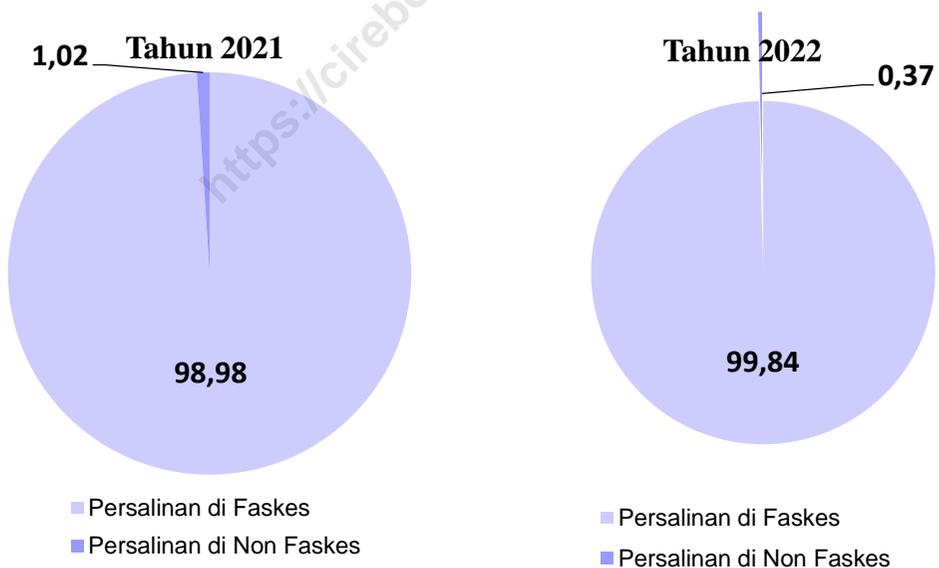
Salah satu pilar dalam transformasi kesehatan adalah transformasi sistem pembiayaan kesehatan. Akses biaya kesehatan yang murah dan mudah terjangkau merupakan harapan semua lapisan masyarakat. Pemerintah mewujudkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk memastikan semua orang memiliki akses layanan kesehatan yang dibutuhkan dengan kualitas yang baik. Pada tahun 2022, persentase penduduk Kota Cirebon yang berobat jalan dan menggunakan jaminan kesehatan sebesar 77,44 persen atau mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut sejalan dengan peningkatan angka kesakitan di tahun 2022.

2.2 Penolong Persalinan

Angka kematian ibu di Indonesia masih tinggi. Tingginya angka kematian ibu dapat disebabkan oleh perencanaan kehamilan yang kurang matang, sehingga perempuan melahirkan terlalu banyak, terlalu dekat, terlalu muda, atau terlalu tua. Selain itu, tingginya angka kematian ibu disebabkan oleh persalinan yang ditolong oleh tenaga yang tidak kompeten dalam bidang kebidanan.

Pemerintah terus berupaya menurunkan angka kematian ibu melahirkan. Program Keluarga Harapan digulirkan untuk menjamin pemenuhan gizi ibu hamil dan pemenuhan kebutuhan persalinan terpenuhi.

Grafik 10.
Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun Yang Pernah Melahirkan Dalam 2 Tahun Terakhir, 2021-2022



Sumber : Susenas Maret 2021- 2022

Persentase persalinan di fasilitas kesehatan di Kota Cirebon sudah tinggi. Sebanyak 99,84 persen perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun yang pernah melahirkan dalam dua tahun terakhir melahirkan anak lahir hidup di fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan yang dimaksud meliputi rumah sakit, klinik bersalin, dan puskesmas.

<https://cirebonkota.bps.go.id>

Bab III

Pendidikan

<https://cirebonkota.go.id>

Salah satu upaya paling strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui pendidikan. Pendidikan sangat penting karena merupakan dasar untuk pengembangan pola berpikir konstruktif dan kreatif. Dengan pendidikan yang cukup memadai, maka seseorang akan bisa berkembang secara optimal baik secara ekonomi maupun sosial. Rumusan tentang pendidikan, lebih jauh termuat dalam UU. No. 20 Tahun 2003, bahwa pendidikan Indonesia bertujuan agar masyarakat Indonesia mempunyai pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Artinya, arah dari proses pendidikan nasional mencakup berbagai aspek kehidupan diri manusia dan masyarakat untuk *survive* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa aspek yang berkaitan dengan pendidikan dapat memberikan gambaran tentang kualitas sumber daya manusia yang ada antara lain harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, tingkat pendidikan dan tingkat partisipasi sekolah.

Beberapa indikator *output* yang dapat menunjukkan kualitas pendidikan SDM antara lain kemampuan membaca dan menulis, angka partisipasi sekolah (APS), dan angka partisipasi murni (APM). Indikator input pendidikan salah satunya adalah fasilitas pendidikan.

3.1 Kemampuan Membaca dan Menulis

Indikator mendasar yang digunakan untuk melihat tingkat kemampuan membaca dan menulis adalah angka melek huruf (AMH) atau *literacy rate*. AMH merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan bidang pendidikan, dan kualitas sumber daya manusia suatu daerah.

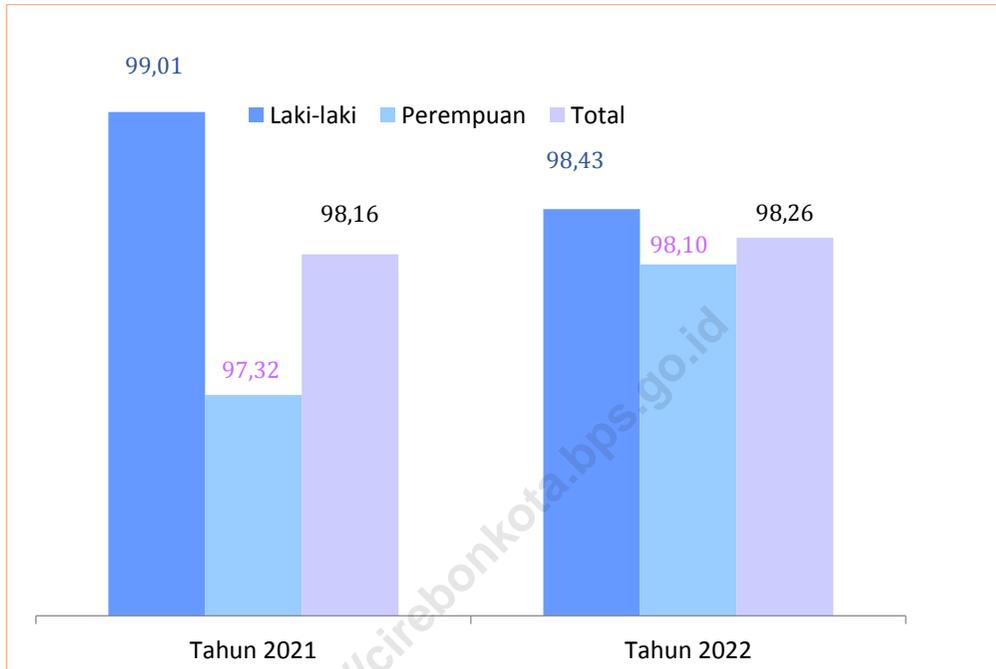
Kemampuan membaca dan menulis sangat penting karena dapat mencerdaskan intelektual, spiritual, emosional, dan kepercayaan. Membaca akan membuka peluang untuk menyerap sebanyak mungkin ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan dan memungkinkan seseorang dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan membaca dan menulis juga bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan kreatif, kritis, analitis dan imajinatif sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas.

Penduduk usia 15 tahun ke atas merupakan komponen masyarakat yang potensial, yang sudah seharusnya dapat membaca dan menulis huruf latin. Pada tahun 2020, masih terdapat 0,85 penduduk yang belum dapat membaca dan menulis huruf latin.

Tingkat literasi penduduk laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan, hal tersebut dapat dilihat dari persentase penduduk laki-laki usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin lebih tinggi dibandingkan persentase penduduk perempuan.

Grafik 11.

Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Kemampuan Membaca dan Menulis, 2021-2022



Sumber : Susenas Maret 2021- 2022

3.2 Partisipasi Sekolah

Salah satu tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah menjamin bahwa sampai dengan tahun 2030 semua anak, baik laki-laki maupun perempuan dapat menyelesaikan pendidikan dasar (*primary schooling*). Salah satu indikator yang dapat digunakan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang mempunyai kesempatan untuk mengenyam pendidikan.

Pada tahun 2022, masih terdapat sekitar 0,55 persen penduduk usia 7-12 tahun yang belum mengenyam pendidikan atau tidak bersekolah. Pada kelompok penduduk usia 13-15 tahun, masih terdapat

sekitar 6,32 persen penduduk yang tidak bersekolah. Selanjutnya, pada penduduk kelompok usia 16-18 tahun masih terdapat 27,71 persen penduduk yang tidak bersekolah.

Angka partisipasi sekolah (APS) dapat digunakan untuk mengukur pemerataan akses terhadap pendidikan. Namun, informasi yang diperoleh dari APS tidak memperhitungkan anak pada suatu kelompok yang benar-benar bersekolah pada jenjangnya.

Tabel 1. APS dan APM Penduduk Kota Cirebon, 2020-2022

Angka Partisipasi Sekolah (APS)			
	2020	2021	2022
7-12 tahun	99,87	99,43	99,45
13-15 tahun	92,94	92,13	93,68
16-18 tahun	75,16	74,49	72,29
Angka Partisipasi Murni (APM)			
SD	95,29	95,15	95,58
SMP	70,79	69,96	69,93
SMA	66,75	67,64	68,50

Sumber: Susenas Maret 2020-2022

Angka partisipasi murni (APM) merupakan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

Pada tahun 2022, capaian APM usia SD di Kota Cirebon adalah 95,58 persen. APM SMP mencapai 69,93 persen, artinya masih ada

sekitar 31,07 persen anak usia 13-15 tahun tidak bersekolah pada jenjang SMP. Dalam tiga tahun terakhir, APM usia SMP mengalami penurunan. Sementara itu, APM usia SMA baru mencapai 68,50 artinya masih ada sekitar 31,50 persen anak usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah pada jenjang SMA. APM usia SMA dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan.

Tabel 2. Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Penduduk Kota Cirebon, 2020-2022

Indikator	2020	2021	2022
Rata-rata Lama Sekolah (penduduk usia 25+ tahun)	9,91	10,12	10,33
Harapan Lama Sekolah (penduduk usia 7+ tahun)	13,12	13,13	13,14

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Kota Cirebon 2022

Harapan Lama Sekolah

Meningkatnya harapan lama sekolah dapat diartikan bahwa semakin baik peluang penduduk untuk mengenyam pendidikan. Pada tahun 2022, anak-anak usia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,14 tahun atau setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I. Angka ini meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya.

Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal. Pada tahun 2022 rata-rata lama sekolah penduduk Kota Cirebon umur 25 tahun ke atas telah menyelesaikan pendidikannya hingga SMA kelas 1.

<https://cirebonkota.bps.go.id>

Bab IV

Ketenagakerjaan

<https://cilindankab.go.id>

Permasalahan di bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu masalah terbesar yang menjadi perhatian pemerintah. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja merupakan sebagian kecil dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah.

Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan wilayah dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan yang baik dan benar sangat ditentukan oleh kondisi ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan. Selain itu, data dan informasi mengenai ketenagakerjaan juga dapat mencerminkan tingkat pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan.

Bab ini menjelaskan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan. Sumber data penghitungan indikator ini diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2022 kondisi Agustus. Indikator tersebut, antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan, persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan, persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha dan jumlah jam kerja, serta persentase pekerja menurut kelompok upah/gaji/pendapatan bersih.

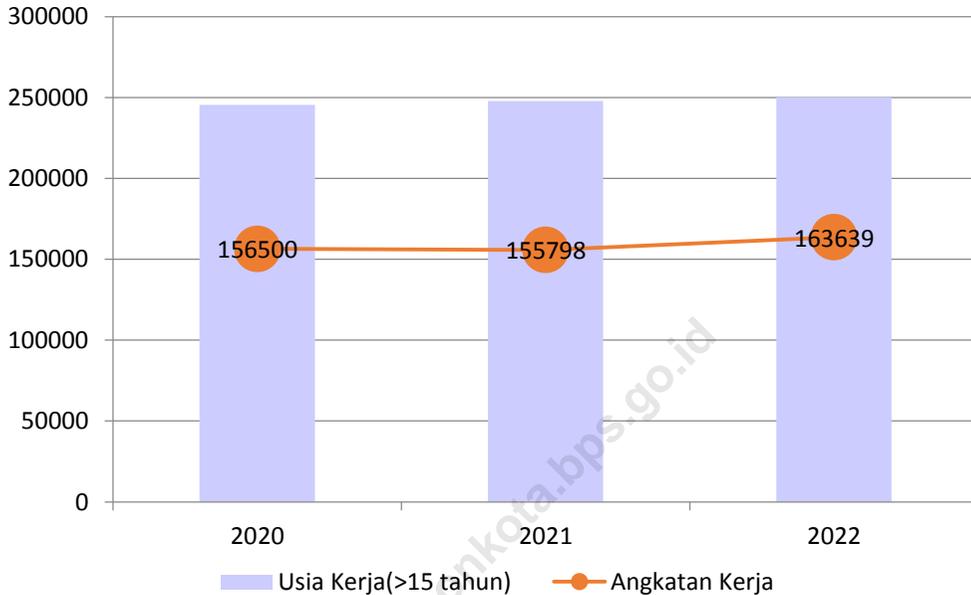
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting yang digunakan untuk menganalisa dan mengukur capaian hasil pembangunan. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja, indikator ini merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas). Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Penduduk usia kerja (lebih dari 15 tahun) di Kota Cirebon Agustus 2022 sebanyak 250.126 orang. Adapun jumlah angkatan kerja (penduduk usia kerja yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran) pada Agustus 2022 mencapai 163.639 orang. Sedangkan jumlah penduduk bukan angkatan kerja mencapai 86.487 orang.

Grafik 12. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas dan Angkatan Kerja, 2020- 2022

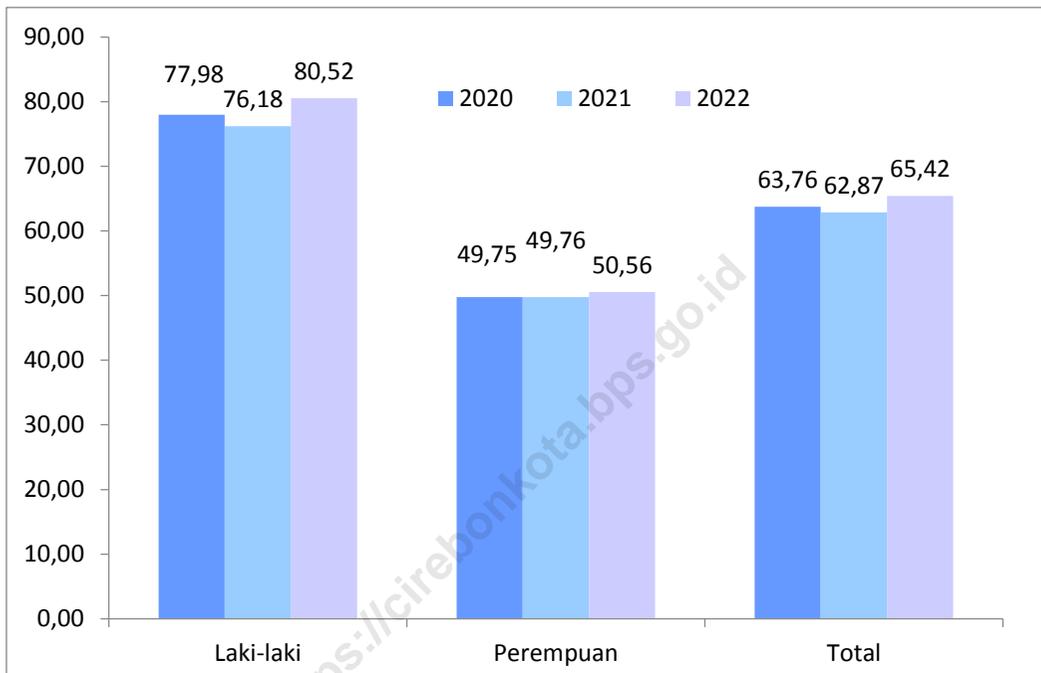


Sumber : Sakernas Agustus 2022

Jumlah penduduk usia kerja cenderung mengalami peningkatan seiring bertambahnya jumlah penduduk. Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Pada Agustus 2022 jumlah penduduk usia kerja sebanyak 250.126 orang. Sebagian besar penduduk usia kerja, sebanyak 163.639 orang adalah angkatan kerja.

TPAK adalah persentase penduduk yang termasuk angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK Kota Cirebon tahun 2022 adalah 65,42 persen. Dalam tiga tahun terakhir angka TPAK mengalami fluktuatif. Pada tahun 2021 TPAK Kota Cirebon mengalami penurunan. Hal itu karena adanya pandemi Covid-19 yang mengganggu pasar tenaga kerja.

Grafik 13. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin, 2020-2022



Sumber: Sakernas Agustus, 2020-2022

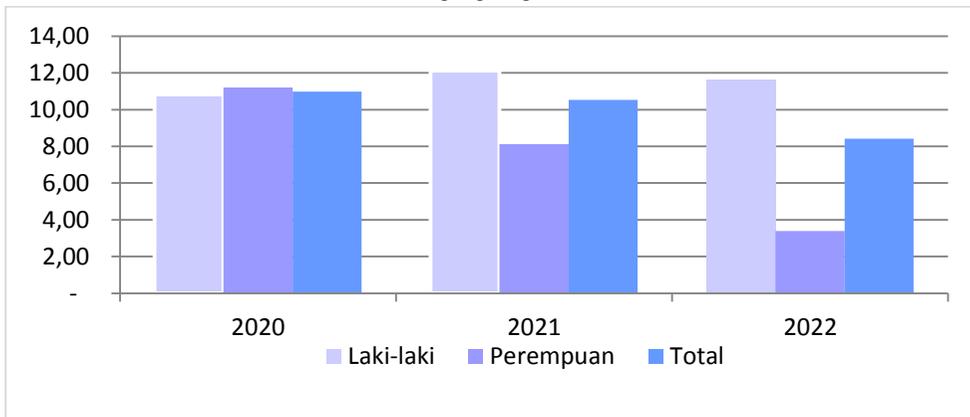
Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dikategorikan sebagai berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, berusaha dibantu buruh tetap, buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas, pekerja keluarga/tidak dibayar. Status pekerjaan utama penduduk Kota Cirebon yang bekerja sebagian besar adalah buruh/ karyawan/ pegawai. Pada Agustus 2022, penduduk bekerja yang berstatus sebagai buruh/ karyawan sebesar 49,05 persen.

Grafik 14. Status Pekerjaan Utama 2020-2022



Tingkat pengangguran terbuka (TPT) keadaan Agustus 2022 di Kota Cirebon mengalami penurunan dibandingkan keadaan Agustus 2021. Penurunan TPT terjadi baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan. Namun demikian, tingkat penurunan TPT perempuan lebih tinggi dibandingkan tingkat penurunan TPT laki-laki. TPT laki-laki lebih tinggi dibandingkan TPT perempuan.

Grafik 15. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin, 2020-2022



Sumber: Sakernas Agustus 2020-2022

Bab V

Pola Konsumsi

<https://cirebonkota.bps.go.id>

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut.

Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain rumah tangga/keluarga cenderung semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan.

Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, di mana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Sesuai dengan karakter perkotaan, di Kota Cirebon persentase pengeluaran perkapita untuk kelompok non makanan masih mendominasi pengeluaran rumah tangga. Namun apabila dibandingkan antartahun, rata-rata pengeluaran non makanan mengalami penurunan. Persentase penurunan yang cukup besar berasal dari konsumsi barang tahan lama.

Tabel 3. Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas (Rupiah), 2021-2022

KOMODITAS	2021	2022
PADI-PADIAN	57.171	59.432
UMBI-UMBIAN	5.174	6.551
IKAN	37.320	39.517
DAGING	35.600	39.501
TELUR DAN SUSU	43.166	35.581
SAYUR-SAYURAN	43.481	41.533
KACANG-KACANGAN	13.851	13.559
BUAH-BUAHAN	28.586	36.463
MINYAK DAN KELAPA	11.886	15.794
BAHAN MINUMAN	18.069	17.206
BUMBU-BUMBUAN	15.638	13.115
KONSUMSI LAINNYA	14.514	13.556
MAKANAN DAN MINUMAN JADI	285.323	308.482
ROKOK DAN TEMBAKAU	59.256	67.969
TOTAL MAKANAN	669.036	708.258
PERUMAHAN DAN FASILITAS RUMAH TANGGA	470.827	459.237
ANEKA BARANG DAN JASA	232.070	231.132
PAKAIAN, ALAS KAKI, DAN TUTUP KEPALA	31.362	29.501
BARANG TAHAN LAMA	54.249	28.017
PAJAK, PUNGUTAN DAN ASURANSI	161.385	88.311
KEPERLUAN PESTA DAN UPACARA/KENDURI	10.779	14.675
TOTAL BUKAN MAKANAN	960.673	850.872
TOTAL PENGELUARAN	1.629.708	1.559.130

Bab VI

Perumahan dan Lingkungan

<https://cirebonkota.go.id>

Manusia memiliki kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, dan papan. Papan dalam hal ini adalah kebutuhan akan rumah tempat tinggal yang layak baik dari segi fisik, fasilitas maupun lingkungannya. Rumah dan kelengkapannya merupakan kebutuhan dasar dan juga merupakan salah satu faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah mempunyai pengaruh terhadap pembinaan watak dalam kepribadian serta merupakan faktor penting terhadap produktivitas kerja dan kreativitas kerja seseorang. Rumah juga mempunyai fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Peningkatan kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan maka akan terwujud kesejahteraan rakyat.

Fungsi rumah adalah sebagai tempat tinggal, selain itu juga rumah dapat menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Status sosial seseorang yang makin tinggi, semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik dan fasilitas yang lengkap. Salah satu dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan, termasuk juga fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

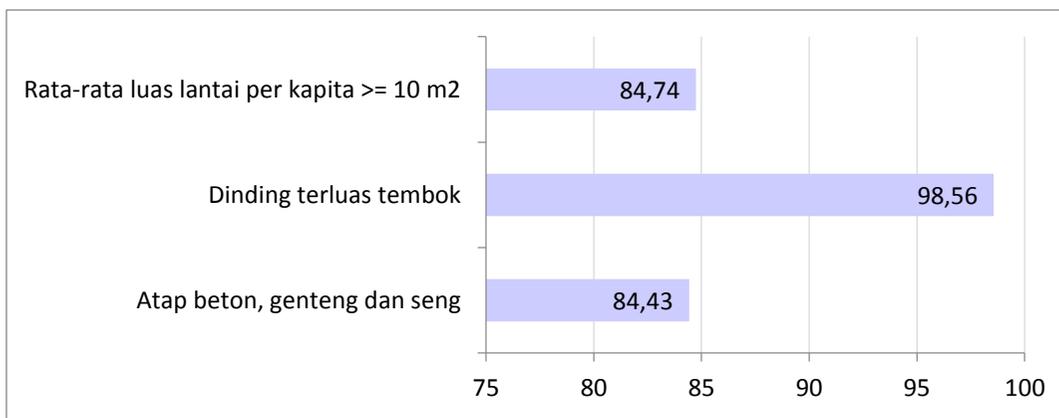
6.1. Kualitas Rumah Tinggal

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2011 rumah yang layak huni dan terjangkau didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Hunian layak memiliki 4 kriteria sebagai berikut: 1. Ketahanan bangunan; 2. Kecukupan luas tempat tinggal; 3. Memiliki akses air minum; 4. Memiliki akses sanitasi layak.

Data hasil Susenas 2021 menunjukkan bahwa terdapat 98,56 persen rumah tangga yang bertempat tinggal di bangunan rumah dengan dinding terluas dari tembok. Selanjutnya, terdapat 84,43 persen rumah tangga yang tinggal di bangunan rumah dengan atap dari beton, genteng, dan seng. Sementara itu, terdapat 93,23 persen rumah tangga yang tinggal di bangunan dengan lantai rumah terluas adalah marmer, keramik, dan ubin.

Grafik 16.

Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan, 2021



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat 2021

Menurut standar *World Health Organization* (WHO) tentang rumah layak huni menyebutkan bahwa rumah yang sehat adalah rumah dengan luas per kapitanya sebesar 10 m²/orang. Artinya dengan asumsi satu rumahtangga terdiri dari 4 (empat) orang maka rumah yang sehat menurut ukuran WHO, rumahtangga tersebut harus memiliki rumah idealnya minimal dengan luas 40 m². Adapun menurut Kementerian Kesehatan standar rumah sehat adalah dengan luas per kapitanya sebesar 8 m²/orang. Di samping tingkat derajat kesehatan penghuninya, luas lantai juga sering dianggap sebagai gambaran tingkat kesejahteraan/status sosial penghuninya. Semakin luas lantai yang dimiliki oleh suatu rumahtangga maka asumsinya semakin sehat dan sejahtera penghuninya. Bila merujuk pada standar WHO di mana luas per kapita ideal (minimal 10 meter persegi) maka persentase rumahtangga di Kota Cirebon dengan luas per kapita ideal sebesar 84,74 persen.

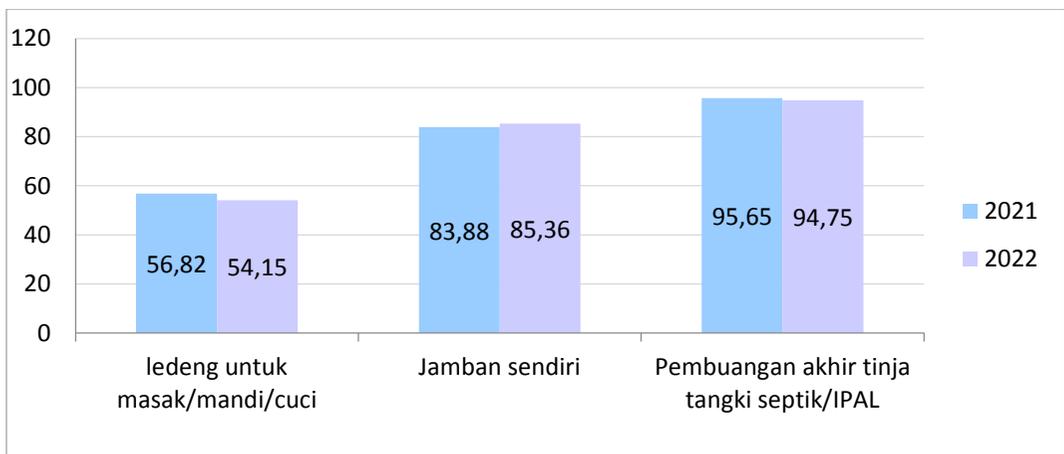
6.2. Fasilitas Rumah Tinggal

Fasilitas rumah tinggal merupakan pemenuhan atas kebutuhan aktivitas seluruh anggota rumah tangga. Kelengkapan fasilitas suatu rumah tinggal akan menentukan kualitas dan kenyamanan rumah tinggal. Fasilitas-fasilitas tersebut adalah tersedianya air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik. Ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Air bersih yang tersedia dalam jumlah yang cukup merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

Selain fasilitas ketersediaan air bersih, sarana jamban merupakan bagian dari usaha sanitasi yang harus diperhatikan. Pembuangan kotoran manusia yang tidak sesuai dengan standar kesehatan akan mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Dampak lebih lanjutnya menyebabkan berbagai macam penyakit seperti *thypus*, disentri, kolera, dan sebagainya. Oleh sebab itu, untuk mencegah dan mengurangi kontaminasi terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan jamban yang sehat. Salah satu fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik.

Karakteristik fasilitas perumahan rumah tangga di Kota Cirebon antara lain sebagian besar menggunakan air leding untuk keperluan masak/mandi/cuci, memiliki jamban yang digunakan anggota rumah tangga sendiri, dan menggunakan tangki septik sebagai pembuangan akhir tinja.

Grafik 17. Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan, 2021-2022



Sumber: Susenas Maret 2021-2022

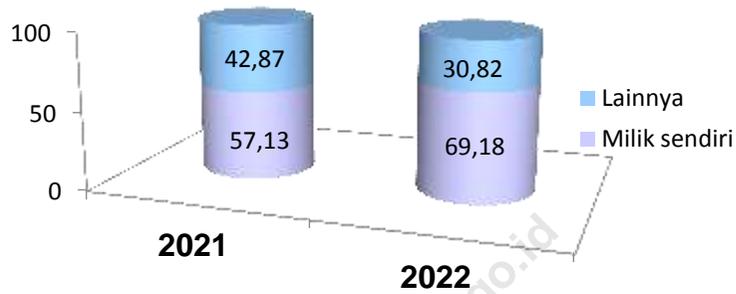
Persentase rumah tangga yang menggunakan ledeng untuk masak/mandi/cuci mengalami penurunan dari 56,82 persen pada tahun 2021 menjadi 54,15 persen pada tahun 2022. Penurunan tersebut terjadi adanya peningkatan rumah tangga yang menggunakan sumur sebagai sumber air utama untuk kegiatan masak/mandi/cuci.

Sementara itu, persentase kepemilikan fasilitas jamban yang digunakan untuk anggota rumah tangga sendiri mengalami peningkatan dari 83,88 persen menjadi 85,36 persen. Selain penggunaan jamban untuk digunakan sendiri, tersedianya jamban dengan fasilitas tangki septik/IPAL merupakan bagian kriteria rumah sehat. Namun pada tahun 2022 persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas tangki septik/IPAL mengalami penurunan yaitu dari 95,65 persen pada tahun 2021 menjadi 94,75 persen pada tahun 2022. Kualitas rumah sehat rumah tangga di Kota Cirebon harus mendapat perhatian untuk terus ditingkatkan.

6.3 Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat adalah status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa, rumah dinas, rumah milik orang tua/saudara atau status kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.

Grafik 18. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah, 2021-2022



Sumber: Susenas Maret, 2021-2022

Pada tahun 2022 persentase rumah tangga yang tinggal dalam bangunan milik sendiri sebesar 69,18 persen. Mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, status kepemilikan rumah milik sendiri tidak akan mencapai 100 persen, hal ini dikarenakan adanya penduduk yang tidak tinggal di suatu daerah secara permanen bukan karena ketidakmampuan memiliki rumah di tempat tersebut.

Bab VII

Kemiskinan

<https://cirebonkota.go.id>

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu. Kemiskinan harus menjadi sebuah tujuan utama dari penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh negara Indonesia, karena aspek dasar yang dapat dijadikan acuan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah teratasinya masalah kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Mengacu pada strategi nasional penanggulangan kemiskinan, definisi kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Kemiskinan secara asal penyebabnya terbagi menjadi 2 macam. Pertama adalah kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu sehingga membuatnya tetap melekat dengan kemiskinan. Kemiskinan seperti ini bisa dihilangkan atau bisa dikurangi dengan mengabaikan faktor-faktor yang menghalanginya untuk melakukan perubahan ke arah

tingkat kehidupan yang lebih baik. Kedua adalah kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil, karenanya mereka berada pada posisi tawar yang sangat lemah dan tidak memiliki akses untuk mengembangkan dan membebaskan diri mereka sendiri dari perangkap kemiskinan atau dengan perkataan lain "seseorang atau sekelompok masyarakat menjadi miskin karena mereka miskin".

Secara konseptual, kemiskinan dapat dibedakan menurut kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut, dimana perbedaannya terletak pada standar penilaiannya. Standar penilaian kemiskinan relatif merupakan standar kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subyektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal serta mereka yang berada dibawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Standar penilaian kemiskinan secara absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun non makanan. Standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan.

Pemberantasan kemiskinan merupakan tantangan global terbesar yang dihadapi dunia saat ini. Berbagai program pemberantasan kemiskinan dirancang dan diterapkan di berbagai negara baik negara maju maupun negara berkembang. Terbentuknya *Sustainable Development Goals (SDGs)* sebagai pengganti *Millenium Development Goals (MDGs)* merupakan agenda pembangunan Pasca MDGs yang berakhir tahun 2015. Target yang pertama dari SDGs adalah mengakhiri kemiskinan, dengan beberapa indikator pendukung antara lain menurunkan jumlah orang yang hidup kurang dari \$1,25 per hari.

Indikator lain yang terkait dalam mengakhiri kemiskinan antara lain melindungi orang yang miskin dan rentan miskin dengan sistem perlindungan sosial.

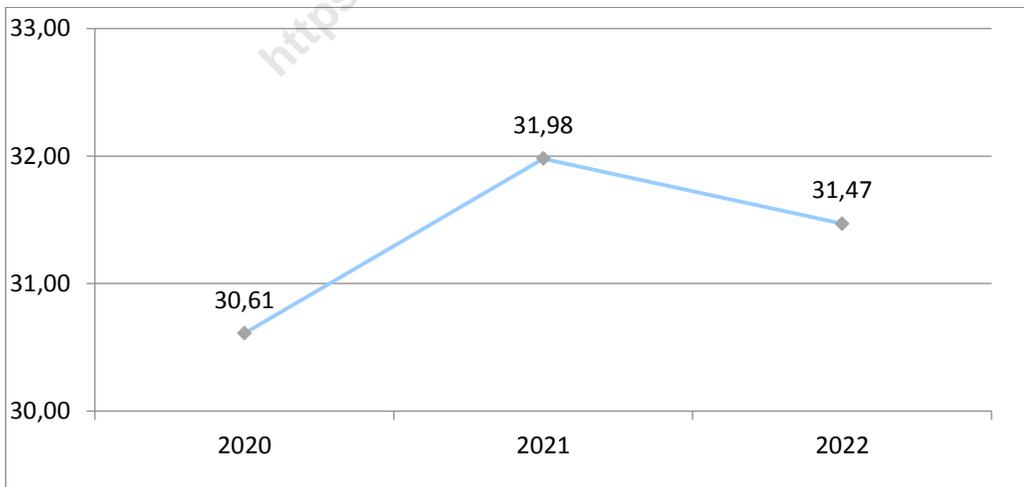
7.1 Perkembangan Penduduk Miskin

Persentase dan jumlah penduduk miskin di Kota Cirebon pada tahun 2022 mengalami penurunan. Berbagai program lebih digencarkan lagi oleh Pemerintah Kota Cirebon untuk menekan angka kemiskinan setelah pada tahun 2021 meningkat akibat pandemi Covid-19.

Pada Maret 2022, jumlah penduduk miskin sebesar 31,47 ribu orang atau sebesar 9,82 persen dari penduduk Kota Cirebon. Sebelumnya, pada Maret 2021, jumlah penduduk miskin sebesar 31,98 ribu orang atau 10,03 persen.

Grafik 19.

Jumlah Penduduk Miskin, 2020-2022 (Maret, ribu jiwa)



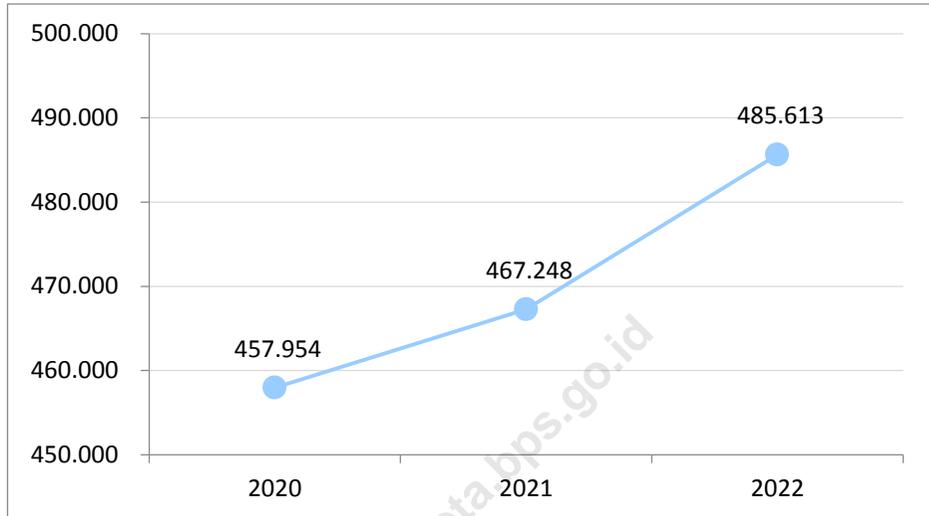
Sumber: Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2020-2022

Karakteristik rumah tangga miskin dapat dilihat dari kondisi demografi, pendidikan dan ketenagakerjaan dari kepala rumah tangga; kondisi perumahan; dan persebarannya menurut kabupaten/kota. Pemahaman mengenai karakteristik rumah tangga miskin penting sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan agar tepat sasaran.

7.2 Garis Kemiskinan (GK), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Garis Kemiskinan digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kota Cirebon mengalami peningkatan setiap tahun selama periode 2020-2022. Garis kemiskinan tahun 2020, sebesar Rp 457.954 per kapita per bulan. Tahun 2021, garis kemiskinan mengalami peningkatan menjadi Rp. 467.248 per kapita per bulan. Selanjutnya pada tahun 2022, garis kemiskinan meningkat lagi menjadi Rp. 485.613 per kapita per bulan.

Grafik 20.
Garis Kemiskinan, 2020-2022
(Rupiah/Kapita/Bulan)

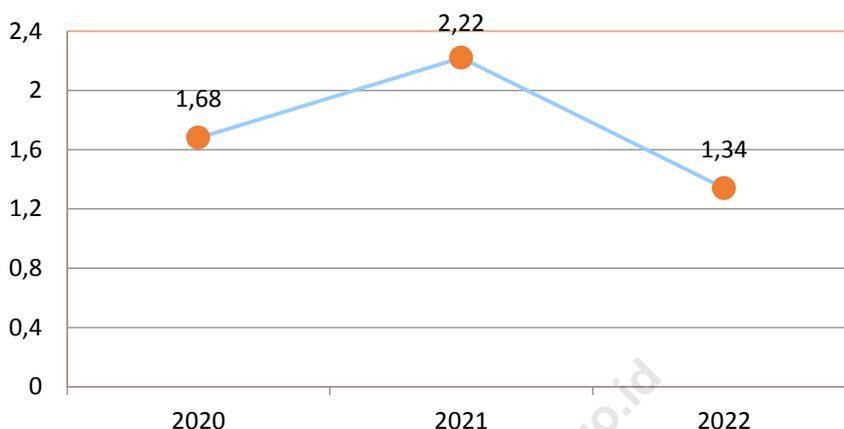


Sumber: Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2020-2022

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Nilai P1 pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan di tahun 2020. Nilai P1 yang semakin tinggi menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin jauh. Tahun 2022 kondisi mulai membaik, nilai P1 mengalami penurunan. Nilai P1 yang semakin kecil, artinya penduduk miskin yang mendekati garis kemiskinan dapat terangkat dari kondisi miskin.

Grafik 21.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), 2020 - 2022

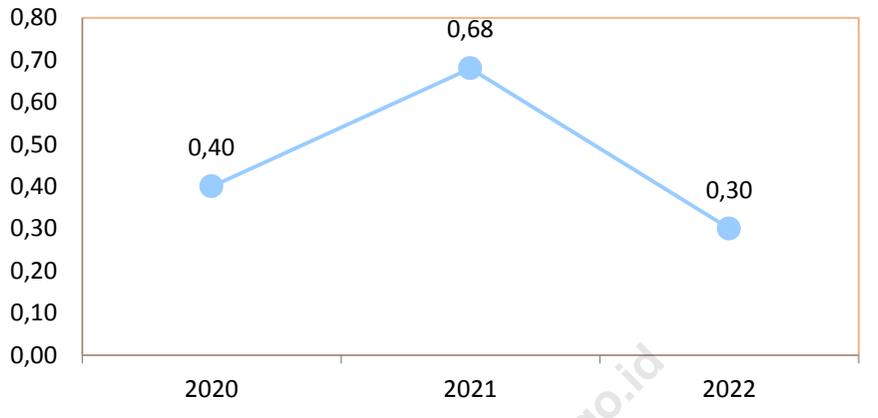


Sumber: Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2020-2022

Indeks keparahan kemiskinan (P2) menggambarkan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Nilai P2 pada tahun 2020 sebesar 0,40 kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 0,68. Hal ini menunjukkan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin semakin tinggi. Selanjutnya pada tahun 2022 nilai P2 mengecil menjadi 0,30.

Grafik 21.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), 2020 - 2022



Sumber: Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2020-2022

Bab VIII

Sosial Lainnya

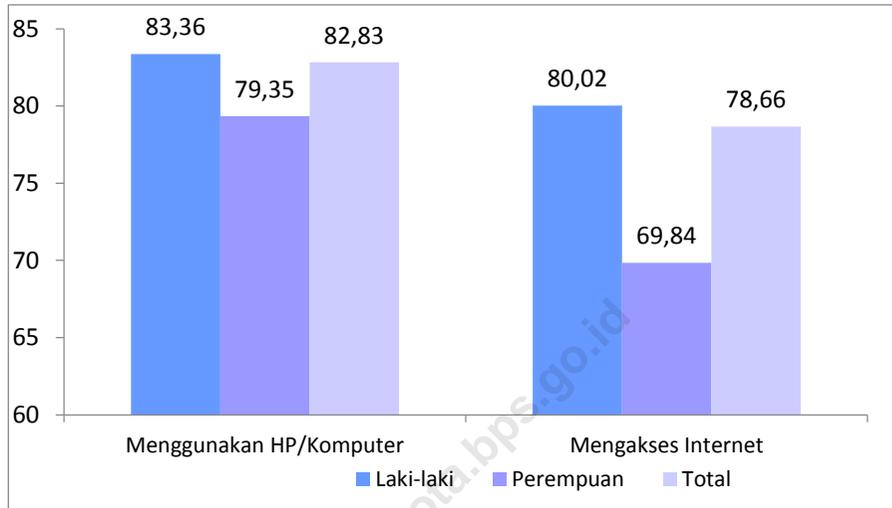
<https://cirebonkota.bp.go.id>

8.1. Teknologi Informasi

Peningkatan penggunaan telepon seluler (*handphone*) cenderung berdampak kepada kepemilikan rumah tangga atas alat teknologi informasi berupa telepon seluler. Saat ini mayoritas penggunaan telepon seluler selain digunakan sebagai alat komunikasi juga digunakan untuk mengakses internet. Telepon seluler selain mudah dibawa, praktis, bersifat pribadi, juga memungkinkan seseorang dapat melakukan berbagai aktivitas dalam waktu bersamaan. Hal inilah yang membuat penggunaan telepon seluler semakin meningkat.

Teknologi dalam telepon seluler semakin canggih. Selain dapat digunakan untuk membantu dalam menyelesaikan tugas kantor, menyimpan file, mengedit dan menyimpan gambar, menikmati hiburan film dan lagu, dan lain-lain. Fitur-fitur yang tersedia dalam telepon seluler sudah mendekati fitur yang ada di dalam komputer. Apalagi dengan kemudahan akses internet, dunia seperti dalam genggaman tangan. Di tahun 2022, persentase anggota rumah tangga berusia 5 tahun ke atas yang menggunakan telepon seluler/ komputer di Kota Cirebon mencapai 82,83 persen. Presentase penduduk laki-laki yang menggunakan HP/ komputer cukup tinggi, yaitu mencapai 83,36 persen. Sementara persentase penduduk perempuan yang menggunakan HP/ Komputer sebesar 79,35 persen.

Grafik 23.
Persentase Anggota RT Berusia 5 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin Dan Penggunaan Teknologi Informasi, 2022



Sumber: Susenas Maret 2022

8.2 Perlindungan sosial

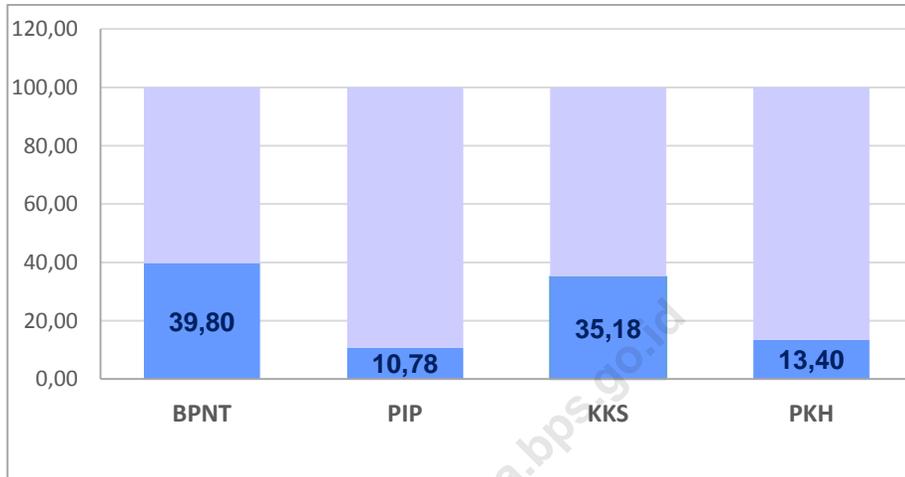
Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diamanatkan bahwa pemerintah harus melindungi segenap bangsa dan tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan bangsa. Selanjutnya dalam Pasal 34 UUD 1945, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara dan negara wajib mengembangkan sistem perlindungan dan jaminan sosial yang bersifat nasional. Berpijak dari sana, pemerintah berusaha mewujudkan sistem perlindungan sosial di Indonesia.

Pasca krisis ekonomi 1998, program perlindungan sosial yang digulirkan oleh pemerintah semakin beragam. Tak hanya jaminan kesehatan, pemerintah memberikan bantuan operasional sekolah, bantuan beras untuk masyarakat miskin, dan bantuan langsung tunai.

Pemerintah juga mencanangkan berbagai program antarlainprogram keluarga harapan, PNPM Mandiri, dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).Pemerintah berkomitmen untuk terus menyempurnakan sistem perlindungan sosial.

Pada tahun 2022, pemerintah menyusun program perlindungan sosial dalam rangka mengurangi angka kemiskinan. Empat program yang digulirkan adalah Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional, dan Program Indonesia Pintar (PIP). Selanjutnya, pemerintah meluncurkan program baru yaitu kartu prakerja dan bantuan subsidi gaji. Berdasar data hasil Susenas Maret Tahun 2022, ada sebanyak 39,80 persen rumah tangga di Kota Cirebon yang menerima bantuan pangan non tunai (BPNT). Selanjutnya, ada sebanyak 10,78 persen rumah tangga yang salah satu anggotanya merupakan penerima Program Indonesia Pintar. Rumah tangga penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tercatat sebanyak 35,18 persen, namun tidak semua dapat menunjukkan kartunya. Sementara itu, terdapat 13,40 persen rumah tangga di Kota Cirebon yang pernah menjadi penerima Program Keluarga Harapan.

Grafik 24.
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Perlindungan Sosial,
2022



Sumber : Susenas Maret 2022

DATA

<http://cirebon.kota.bps.go.id>

Mencerdaskan Bangsa



BPS KOTA CIREBON

Jl. Sekar Kemuning I, Karyamulya, Kec. Kesambi,
Kota Cirebon, Jawa Barat 45135